

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Koran Tempo

Wilayah Berita : Kota Semarang

Halaman 17 dan 20

NJOP di Bawah Rp130 Juta Gratis PBB

BALAI KOTA - Pemkot Semarang pada 2018 menggratiskan PBB untuk tanah dan bangunan yang nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 130 juta. Meski demikian, tunggakan PBB yang pernah ada, tetap harus dilunasi terlebih dulu.



Adapun tanah dan bangunan yang NJOP-nya di atas Rp 130 juta, tetap membayar PBB seperti biasanya.

Kepala Bidang Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Yudi Mardiana menjelaskan, kebijakan tersebut untuk meringankan beban warga yang kurang mampu.

"Sistemnya subsidi silang. Jadi warga yang kaya memberikan subsidi kepada warga yang kurang mampu. Kami harap kebijakan ini bisa mengurangi beban warga yang kurang mampu," ujar Yudi Mardiana, kemarin.

Meski menerapkan kebijakan itu, Yudi Mardiana mengatakan, tetap meningkatkan target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

Berkaca pada hasil PBB pada 2017 lalu, nilainya mencapai Rp 344,716 miliar dari target Rp 330 miliar. Dia optimistis, PAD dari sektor PBB masih bisa meningkat pada tahun depan.

NJOP...

(Sambungan hlm 17)

Secara keseluruhan, target pendapatan daerah Kota Semarang pada 2018 ini di angka Rp 4,3 triliun. Terdiri atas PAD sebesar Rp 1,78 triliun, dana perimbangan sebesar Rp 1,74 triliun, ditambah dengan sektor pendapatan daerah lain-lain yang sah sebesar Rp 766 miliar.

Dari sektor PAD sendiri, terdiri atas pajak daerah sebesar Rp 1,2 triliun, hasil retribusi daerah Rp 158,292 miliar. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 43,522 miliar, serta pendapatan asli daerah lain-lain yang sah sebesar Rp 384,559 miliar.

"Dari sektor pajak, targetnya kami naikkan menjadi Rp 1,2 triliun dari 2017 lalu sebesar Rp 1,1 triliun. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PBB, dan Pajak Penghasilan Jalan," ujarnya.

Untuk memenuhi target tersebut, operasi yustisi akan terus dilakukan. Salah satunya untuk objek air tanah dan mineral bukan logam dan batuan. Selain itu, juga menerapkan aplikasi elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e-SPTPD) bagi wajib pajak di Kota Semarang.

Lampaui Target

Adapun Kepala Bidang Pajak Daerah 1 Bapenda Kota Semarang, Suryono mengatakan, capaian PAD pada tahun lalu melampaui target, yakni di angka Rp 1,2 triliun dari target sebesar Rp 1,1 triliun. Namun demikian, ada beberapa sektor yang masih di bawah target.

Hal itu seperti pajak sarang burung walet, yang ditargetkan sebesar Rp 50 juta per tahun. Namun, hanya diperoleh Rp 1.020.000 atau 2,04 persen. Kemudian pajak reklame yang ditargetkan Rp 31 miliar, namun hingga akhir tahun hanya mencapai Rp 28,62 miliar.

Suryono menjelaskan, perolehan pajak

reklame juga mengalami kendala, karena pada Oktober 2017 lalu, diberlakukan peraturan baru, yakni Perda No 6/2017 tentang Reklame.

Salah satu isinya berbunyi, pajak yang dibayar hanya pada reklame yang berizin. "Sebelumnya kan pajak reklame yang dibayar itu yang berizin dan tidak berizin. Ini yang berizin semua sehingga berkurang besar. Sekarang ini masa transisi. Nanti kalau sudah berizin semua, pasti naik lagi pendapatan dari pajak reklame," imbuh dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengatakan, beberapa sektor PAD masih bisa ditingkatkan, salah satunya dari sektor parkir. Penerapan alat parkir di *on street* merupakan salah satu cara peningkatan pendapatan dari sektor parkir. "Potensi pendapatan dari sektor parkir bisa ditingkatkan. Pemasangan alat parkir *on street* bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan dari sektor parkir," tandasnya. (K18,H74-22)